

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi politik Anindya Bakrie sebagai pendiri VIVA Networks tampak jelas dalam arah pemberitaan seputar Pilpres 2024. Analisis konten tvonenews.com mengungkap bias positif yang signifikan terhadap pasangan Prabowo-Gibran dibandingkan kandidat lain. Framing berita cenderung menonjolkan keberhasilan, citra moderat, serta janji ekonomi pasangan tersebut dari sisi bisnis-politik. Pilihan editorial ini bukan kebetulan, melainkan sebuah strategi kalkulatif yang dipengaruhi oleh kepentingan korporat dan politik dalam lingkaran elite seperti Anindya. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi politik media yang menyatakan bahwa pemilik media memiliki leverage signifikan dalam pembentukan opini publik. Kesimpulan ini menguatkan hipotesa awal penelitian bahwa konglomerat media dapat memainkan peran aktif dan strategis dalam kontestasi politik elektoral. Kesimpulan ini memiliki implikasi signifikan untuk memahami hubungan antara media, kekuasaan ekonomi, dan politik di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian menemukan adanya transformasi strategi Anindya Bakrie pasca Pilpres yang memanfaatkan sisa-sisa (residu) politis sebagai modal baru. Sebagai Ketua Umum KADIN, Anindya memperkuat literasi bisnis dan politik dengan cara formal dan strategis. Melalui framing media yang diselaraskan dengan agenda ekonomi pemerintahan baru dan memperkuat legitimasi korporat sekaligus politik. Strategi ini menghadirkan model hibrida antara strategi korporat dan kerja politik lintas institusi. Kesimpulan penelitian ini juga menunjukkan bagaimana ekspansi digital, dan diplomasi ekonomi internasional menjadi elemen terintegrasi dalam strategi transformasi pasca Pilpres 2024. Kendati demikian, model seperti ini mengundang kritik soal politisasi organisasi dan independensi media. Bab ini menegaskan bahwa

residu politik pasca elektoral dapat memicu strategi bisnis politik baru. Hal ini relevan untuk kajian ekonomi politik media dan demokrasi di Indonesia. Studi ini menyarankan peningkatan transparansi di KADIN dan media milik elite. Evaluasi jangka panjang tetap diperlukan untuk melihat dampak terhadap iklim usaha dan demokrasi.

Kesimpulan menunjukkan bahwa Anindya memanfaatkan jaringan elite dan framing media untuk mengakomodir kepentingan bisnisnya. Proses ini menghadirkan kepentingan bisnis yang dijustifikasi melalui narasi kemajuan digital dan publikasi positif media. Transformasi ini memperlihatkan trik strategi politik-bisnis pasca Pilpres, di mana kekuasaan digunakan untuk menyelamatkan aset media. Ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap proses hukum dan pembentukan opini bisnis. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola media dan transparansi restrukturisasi. Studi ini juga mengidentifikasi perlunya regulasi yang mengawasi perjalanan politik korporat. Analisis ini relevan bagi pakar hukum ekonomi dan media. Bab ini merekomendasikan audit publik dan regulasi tambahan terhadap media yang memiliki polemik kepentingan politik. Penelitian ini membuka jalur kajian lanjutan mengenai mekanisme legal-politik dalam restrukturisasi media.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik Anindya sebagai Ketua Umum KADIN dilaksanakan dengan pendekatan *institutional advocacy*. Ia memimpin sejumlah kebijakan penting seperti digitalisasi ekonomi, transisi energi, dan pemberdayaan UMKM yang selaras dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran. Analisis Bab ini menegaskan bahwa narasi tersebut didukung oleh pemberitaan media miliknya, yang memposisikan Anindya sebagai fasilitator utama percepatan program ekonomi nasional. Strategi ini membawa Bakrie Group berada pada posisi strategis dalam hubungan bisnis politik. Namun, hal ini juga menyebabkan kritikan terhadap independensi KADIN sebagai lembaga bisnis yang idealnya netral. Kesimpulan ini

menunjukkan bahwa korporat media dapat memanfaatkan organisasi bisnis formal sebagai platform politik. Studi ini merekomendasikan agar pembentukan kebijakan publik melibatkan mekanisme pengawasan multipihak. Selain itu, penting untuk memastikan peran advokasi korporat tidak merugikan masyarakat. Analisis ini membuka diskusi tentang tata kelola kelembagaan bisnis di masa depan.

Metode analisis konten yang digunakan dalam skripsi ini terbukti efektif untuk mengungkap pola framing dan bias media secara sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa platform tvonenews.com konsisten menggunakan tema keberhasilan ekonomi dan kolaborasi publik dan swasta dalam memberitakan Prabowo-Gibran. Data ini menunjukkan efektivitas model research dalam menangkap orientasi kepemilikan media. Kesimpulan ini memberikan dasar metodologis bagi studi serupa di masa mendatang. Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan kualitatif memiliki keterbatasan generalisasi. Oleh karena itu, studi ini menyarankan pengembangan dengan metode kuantitatif dan wawancara mendalam. Hal ini penting untuk memperkuat bukti empiris orientasi politik media. Studi ini juga mengidentifikasi potensi bias penelitian, termasuk bias analisis terhadap topik sensitif. Bab ini menghimbau adanya triangulasi data untuk penelitian lanjutan. Evaluasi lebih luas dapat meningkatkan kualitas pemahaman hubungan media-politik korporat.

Kontribusi teoretis skripsi ini terletak pada pengembangan teori ekonomi politik media di Indonesia, khususnya dalam konteks konglomerasi media dan orientasi politik elektoral. Studi ini memvalidasi argumen bahwa media korporat dapat menjadi instrumen strategis elite dalam menciptakan dinamika opini politik. Temuan ini relevan untuk literatur global tentang political capitalist dan media oligarki. Selain itu, penelitian ini memberikan model empiris bagaimana politik pemilihan umum menciptakan residu politik yang mempengaruhi strategi korporat pasca kontestasi elektoral. Kontribusi ini memperkaya penelitian di bidang komunikasi politik,

ekonomi-politik, dan governance. Bab ini mendorong perluasan kajian tentang monitoring institusi bisnis yang berasosiasi dengan politik. Temuan ini juga bermanfaat bagi regulator media dan bisnis untuk menciptakan sistem yang lebih transparan. Studi ini mengusulkan pengembangan studi kritis terhadap orientasi media di negara demokrasi muda Asia.

Dengan demikian, skripsi ini menegaskan bahwa orientasi politik konglomerat media terhadap Pilpres 2024 mencerminkan organisasi strategis dan adaptasi pasca kemenangan politik. Residu politik pasca kemenangan Prabowo-Gibran di pilpres 2024 menghasilkan pola transformasi Anindya Bakrie yang menggabungkan restrukturisasi bisnis, penetrasi politik kelembagaan, dan kontrol media. Studi ini memperlihatkan bahwa strategi seperti ini menuntut institusi demokrasi yang lebih tangguh dalam menghadapi pola hegemoni korporat. Kesadaran pemilih dan jurnalis menjadi penting dalam mengidentifikasi bias. Transformasi juga memunculkan tantangan baru dalam mengatur media privat-politik. Analisis ini membuka peluang penelitian multidisipliner tentang hubungan media dan politik di negara berkembang. Bab ini berharap agar studi ini menjadi referensi penting bagi generasi akademisi selanjutnya. Dan juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia perlu memperkuat asas checks and balances terhadap pelaku media-politik.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Teoritis

Saran teoritis pertama yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan pendekatan ekonomi politik media dalam menelaah orientasi politik konglomerat media di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa media tidak berdiri sebagai institusi netral, melainkan sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh elite ekonomi. Dalam kasus Anindya Bakrie dan

VIVA Networks, penguasaan atas media digunakan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk memengaruhi opini publik menjelang pemilihan presiden. Oleh karena itu, studi selanjutnya dapat mengembangkan teori ekonomi politik media dengan menyesuaikan konteks Indonesia yang oligarkis. Pendekatan ini perlu diintegrasikan dengan analisis kebijakan publik yang mengontrol media dalam dinamika politik, sistem kepemilikan media, dan dinamika kontestasi politik khususnya pada Pemilihan Presiden 2024.

Peneliti juga menyarankan untuk menggunakan teori ini dalam meneliti aktor-aktor media lainnya yang memiliki pengaruh serupa dalam konstelasi politik nasional. Dengan demikian, akan terbentuk pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pola kekuasaan dan kepentingan yang beroperasi dalam lanskap media. Teori ekonomi politik media juga memungkinkan identifikasi struktur produksi informasi yang bias dan tidak netral secara politik. Hal ini akan memperkuat basis teoritis bagi upaya kritis dalam membaca arah pemberitaan dan afiliasi media. Maka dari itu, teori ini sangat relevan untuk dijadikan fondasi teoritis dalam penelitian lanjutan mengenai hubungan antara konglomerat media dan orientasi politik di era demokrasi elektoral.

Saran teoritis berikutnya adalah agar studi orientasi politik konglomerat media memperluas kerangka analisisnya dengan mengadopsi perspektif budaya politik yang ditawarkan oleh Almond dan Verba. Pendekatan ini menekankan pentingnya sikap, nilai, dan orientasi warga negara terhadap sistem politik sebagai bagian dari keberlanjutan demokrasi. Dengan mengkaji dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif dari orientasi politik masyarakat yang terpapar media milik konglomerat, studi lanjutan dapat mengungkap bagaimana konstruksi narasi politik dibentuk dan diterima oleh publik. Teori ini juga penting untuk melihat sejauh mana keberpihakan media berkontribusi terhadap pembentukan budaya politik tertentu apakah partisipatif, subjek, atau bahkan parokial.

Kombinasi teori budaya politik dan ekonomi politik media dapat menjadi kerangka analisis yang kuat dalam mengukur efek pemberitaan terhadap kesadaran politik masyarakat. Hal ini akan memperkaya wacana ilmiah tentang bagaimana konglomerat media memainkan peran dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini akan mendorong penelitian lintas disiplin antara ilmu politik, komunikasi massa, dan sosiologi. Dalam konteks skripsi ini, teori budaya politik membantu menjelaskan efek struktural dari pemberitaan VIVA Networks terhadap konstituen pemilih Prabowo-Gibran. Integrasi teori ini juga memperkuat argumen bahwa media memiliki fungsi ideologis yang penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan politik. Oleh karena itu, perspektif budaya politik sangat relevan sebagai penguatan kerangka teoritis dalam studi konglomerasi media dan orientasi politik.

Saran teoritis ketiga adalah perlunya pemanfaatan teori agenda setting dan framing untuk memperjelas mekanisme pembentukan opini publik oleh media konglomerasi dalam konteks kontestasi politik. Teori agenda setting menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk menetapkan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat, sementara teori framing menjelaskan bagaimana isu tersebut dipresentasikan dan diinterpretasikan. Kedua teori ini sangat penting dalam menganalisis bagaimana tvonenews.com dan platform digital VIVA Networks mengonstruksi pemberitaan yang menguntungkan pasangan calon Prabowo-Gibran. Studi lanjutan perlu mengembangkan metode analisis isi secara sistematis untuk melihat pola dominasi narasi dalam pemberitaan selama masa kampanye.

Kerangka teoritis ini juga memungkinkan pemetaan relasi antara kepentingan pemilik media dan strategi framing yang digunakan dalam pemberitaan. Dalam kasus Anindya Bakrie, teori ini relevan karena memberikan ruang analitis untuk membedakan antara pengaruh struktural (ekonomi politik) dan pengaruh naratif

(agenda setting dan framing) dalam pembentukan orientasi politik publik. Selain itu, pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sehingga fleksibel diterapkan untuk berbagai metode. Peneliti selanjutnya dapat menggali sejauh mana pengaruh media konglomerat dalam menciptakan persepsi positif atau negatif terhadap kandidat tertentu dalam pemilu. Dengan menyandingkan teori ini dengan pendekatan ekonomi politik, akan tercipta landasan teoritis yang lebih kokoh untuk memahami kekuatan simbolik media dalam ruang publik politik. Oleh karena itu, penggunaan teori agenda setting dan framing sangat dianjurkan dalam pengembangan studi akademik mengenai konglomerasi media dan politik elektoral di Indonesia.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis pertama diarahkan pada pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dewan Pers. Penulis memberikan sarah bahwa mereka perlu memperkuat peraturan untuk transparansi kepemilikan media dan hubungan politik antara pemilik dengan kelompok tertentu. Regulasi tersebut harus mencakup kewajiban penyampaian laporan bulanan terkait kegiatan politik pemilik media selama masa kampanye pilpres 2024 maupun pasca pilpres 2024. Dengan tumbuhnya pola “residu politik” konglomerat media, pelibatan regulasi semacam ini menjadi penting untuk menjaga independensi lembaga pers. Selain itu, Dewan Pers dan Kominfo dapat menginisiasi pelatihan integritas jurnalistik bagi wartawan dan redaksi di media seperti VIVA Networks. Pelatihan ini perlu mencakup pemahaman tentang konflik kepentingan dan kode etik pewaritaan politik. Penerapan mekanisme aduan masyarakat terhadap liputan politik juga tidak kalah penting untuk responsif antar pihak. Dengan adanya regulasi dan edukasi publik, masyarakat dapat lebih teliti dalam menilai kualitas pemberitaan

Saran praktis kedua ditujukan kepada VIVA Networks, khususnya portal berita online tvonenews.com untuk meningkatkan transparansi editorial dan menjamin independensi redaksional. VIVA Networks hendaknya merumuskan kode etik internal yang tegas, mencakup prosedur klarifikasi untuk berita politik dan deklarasi konflik kepentingan terkait kepemilikan media. Pengelola media perlu memperkenalkan praktik desk redaksi kolegal yang melibatkan pihak ketiga untuk mengevaluasi liputan politik. Hal ini sejalan dengan rekomendasi untuk menjamin objektivitas media pasca-restrukturisasi PKPU terhadap VIVA dan peran Anindya dalam mengarahkan narasi media. Penerapan standarisasi semacam itu juga dapat merespons kritik tentang bias framing pemberitaan positif terhadap Prabowo–Gibran selama Pilpres 2024. VIVA perlu menetapkan indikator kuantitatif seperti frekuensi keberimbangan narasumber dan sudut pandang politik. Oleh karena itu, indikator ini sebaiknya dipublikasikan dalam laporan tahunan media guna mendukung akuntabilitas publik. Masyarakat dan lembaga pengawas pers seperti Dewan Pers pun membutuhkan transparansi ini agar independensi media tetap terjaga. Dengan demikian, Implementasi ini juga menyelaraskan dengan prinsip jurnalisme berkualitas dalam iklim media digital yang penuh tekanan.

Saran praktis ketiga ditujukan kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam menopang independensi kelembagaan setelah pergantian kepemimpinan Anindya Bakrie. Kadin perlu merumuskan pedoman kepemimpinan berbasis kompetensi, bukan loyalitas politik, untuk menjaga kredibilitas organisasi pasca-Munaslub September 2024. Pedoman ini sebaiknya mencakup mekanisme evaluasi tahunan terhadap program-program Kadin, melibatkan stakeholder eksternal seperti akademisi dan asosiasi usaha kecil. Pendekatan kolaboratif seperti ini dapat menghilangkan persepsi politisasi dan memperkuat posisi Kadin sebagai mediator antara pengusaha dan pemerintah. Selain itu, diperlukan prosedur penyelesaian konflik

internal yang transparan, agar dualisme kepemimpinan seperti saat itu tidak kembali terjadi. Sebagai tambahan, Kadin perlu menciptakan forum dialog reguler antar anggota tentang isu kebijakan bisnis dan investasi, khususnya sektor digital dan energi hijau. Adopsi prinsip good governance dalam proses pengambilan keputusan anggota Kadin dapat menjadi contoh anggota lainnya. Dengan demikian, Kadin dapat tetap dianggap sebagai arena yang profesional dan bebas dari tekanan politik. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas iklim usaha nasional.

Saran praktis kelima difokuskan pada masyarakat sipil dan akademisi yang berkepentingan dalam media, demokrasi, dan ekonomi politik. Mereka perlu menyusun lembaga monitoring media independen yang memetakan bias pemberitaan konglomerat media secara periodik, terutama menjelang pemilu. Analisis seperti yang dilakukan dalam skripsi ini dapat dijadikan dasar metodologis untuk pemantauan berkelanjutan. Lembaga seperti Center for Media and Democracy atau SAFEnet dapat mengembangkan indikator objektivitas dan independensi media, serta menggerakkan kampanye literasi media bagi warga. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi bias editorial tersembunyi dan meminimalisir pengaruh echo chamber digital. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan media publik dapat menghasilkan kajian bersama sebagai bahan diskusi publik. Hal ini memperkuat ekosistem demokrasi yang sehat. Publik juga perlu dilibatkan dalam evaluasi terbuka terhadap korelasi antara kepemilikan media dan orientasi pemberitaan politik. Rekomendasi ini memberikan dasar praktis untuk memperkuat cadre pemahaman demokrasi media di era digital.